

Demokrasi Jokowi

Teuku Kemal Fasya

Bagaimana hendak mengistilahkan partisipasi relawan pendukung Joko Widodo baik pra pencalonan, saat pencalonan, hingga terpilih sebagai presiden?

Bagaimana relawan membela ketika ia di-*bully* (fitnah, disinformasi, stigmatisasi) saat kampanye lalu? Bagaimana pula menyebutkan “politik *blusukan*” Jokowi, baik ketika ia menjadi walikota Solo, gubernur DKI, dan calon presiden?

Ada beberapa model *blusukan* para pemimpin Indonesia sebelumnya dengan istilah sidak (inspeksi mendadak), turba (turun ke bawah), atau waskat (pengawasan melekat). Politik *blusukan* ini pula yang menarik perhatian bos Facebook, Mark Zuckerberg sehingga ingin merasakan alam *blusukan* Jokowi secara langsung.

Model Jokowi sangat berbeda, bahkan ketika Ahmad Heryawan mencoba menerjemahkan melalui aksi mengangkat karung beras atau Hidayat Nur Wahid ketika berenang dalam banjir pada musim Pilkada lalu. Homi K. Bhabha, pakar poskolonial keturunan India menyebutnya *mimicry*: peniruan (Bhabha, *The Location of Culture*, 1994). Mereka berbeda, tidak otentik, dan tetap “sang liyan” (*the others*). “*A subject of a different that is almost the same, but not quite.*”

Bagaimana pula menganalisis konstruksi pemikiran Jokowi tentang demokrasi? Di antara semua presiden yang melafazkan demokrasi (minus Soeharto), Jokowi lah yang paling sedikit mengutip pemikir-pemikir asing. Paling ia hanya mengutip Bung Karno, yang di dalam pemikirannya terkandung ekstraksi pemikir-pemikir dunia. Soekarno tangkas mengutip GWF Hegel, Karl Marx, Lenin, Voltaire, J.J. Rousseau, Thomas Jefferson, Sun Yat Sen, dan lain lain. Jokowi tidak.

Juga penting dilihat langkah Jokowi mendekati pimpinan MPR pascakekalahan menyakitkan kelompok Koalisi Indonesia Hebat 8 Oktober lalu. Puncak pendekatan Jokowi adalah ketika ia bisa bersilatullahi dengan Prabowo 17 Oktober, yang kemudian tercetus semangat rekonsiliasi dan mendukung pemerintahannya.

Jokowi tidak pandai berpidato tentang demokrasi. Tidak seperti SBY yang fasih berceramah demokrasi seperti di forum bentukannya, Bali Democracy Forum (BDF). Jokowi? Konsep demokrasi yang pernah diucapkan Jokowi yang saya ingat adalah saat debat capres-cawapres, “demokrasi sesungguhnya memberi kegembiraan bagi rakyat”.

Gaya Jokowi

Apa yang terekam terkait Jokowi, baik gerakan relawan, politik partisipasi, dan wacana demokrasi adalah identik miliknya. Itulah gaya Jokowi: otentik dan generik!

Bagaimana pula pola partisipasinya? Demokrasi partisipatoris (*participatory democracy*) Jokowi memiliki langgam yang berbeda dengan yang umum dikenal sebagai model Skandinavian. Begitu pula wacana demokrasi yang diproduksinya.

Saya cenderung mengatakan itulah “demokrasi Jokowi”. Istilah dengan tanda kutip itu menjadi indeks bahwa apa yang dihasilkan dari model politik dan arah perubahan Jokowi tetap merupakan kombinasi dari banyak konstruksi yang telah lebih dahulu dikenal dalam khazanah ilmu politik dan pembangunan, demokrasi, dan gerakan sosial. Namun tetap menyisihkan distingsi yang bisa dinilai berbeda.

Bahkan sesungguhnya analisis metafisika pun layak dimasukkan ketika menilai sukses demokrasi Jokowi. Dalam sebuah percakapan dengan saya, Prof. Daoed Joesoef sempat melontarkan kalimat bahwa kemenangan Jokowi saat Pilpres lalu menunjukkan bahwa Allah masih sayang dengan Indonesia. Bahwa variabel kesuksesan Jokowi bukan saja dari otentisitas politik partisipasi, keikhlasan para relawan, kuatnya jaringan komunikasi di media sosial, tapi juga campur tangan Tuhan.

Syukuran Politik

Kembali ke konsep “demokrasi ialah membangun kegembiraan”, Jokowi pun kembali terkenang saat pelantikan presiden. Setelah pelantikan Jokowi dan JK di gedung MPR Senayan, Senin (20/10), mereka diarak melalui pesta rakyat sepanjang jalan utama Jakarta. Momentum itu harus dilihat sebagai syukuran politik, titik berangkat demokrasi rakyat yang jauh dari semangat hura-hura apalagi huru-hara.

Kali terakhir saya merasakan aura kegembiraan seperti itu adalah pada 20 Mei 1998. Saat itu jutaan massa, mahasiswa bersatupadu dengan masyarakat, dari delapan arah mata angin melakukan *long march* menuju Alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Semua berkumpul dan mendengar titah perubahan dari tokoh-tokoh mahasiswa dan Sultan Hamengku Buwono X.

Sorak-sorai revolusi damai menjadikan aksi 20 Mei 1998 masuk dalam kaleidoskop perubahan Indonesia. Saat itu jutaan orang mendapatkan makanan dan minuman gratis dari masyarakat. Itulah terakhir saya merasakan kesukarelaan begitu membuncah, terhampar sepanjang jalan. Esok harinya Soeharto berpidato menyatakan berhenti sebagai presiden.

Enambelas tahun setelah Soeharto jatuh, 20 Oktober 2014, Jokowi – JK dilantik sebagai presiden dan wakil presiden baru Indonesia. Memang ia bukanlah yang pertama dipilih oleh rakyat, tapi mampu menghadirkan kegembiraan begitu besar bagi rakyat. 10 tahun pemerintahan SBY sebenarnya menjadi harapan berakhirnya transisi demokrasi, tapi tidak serta-merta terjadi karena ada diskontinuitas dan “patahan” (*rupture*), menggunakan istilah Michel Foucault. Diakui beberapa kemajuan terjadi di masa SBY, tapi sayangnya sebagian mengalami involusi dan regresi politik, ekonomi, dan budaya. Fase Jokowi – JK inilah diharapkan demokrasi melaju kencang dan tidak perlu mundur lagi.

Akan dosa jika mengatakan Jokowi pasti mampu melakukan perubahan dengan cepat, terstruktur, dan sistematis. Mengutip pernyataan Suraiya Kamaruzzaman, aktivis perempuan Aceh, “demokrasi Jokowi” ini bisa menjadi jalan baru yang lebih egaliter. Kekuatan Jokowi terletak pada kesederhanaannya. Batin demokrasi Jokowi sebenarnya tak berbeda dengan kebanyakan masyarakat. Ia tahu bagaimana menginspirasi dan membangkitkan kegembiraan sehingga menjadi energi yang berguna bagi perubahan dan demokrasi.

Teuku Kemal Fasya, mantan aktivis mahasiswa 1998.

Kompas, 21 Oktober 2014.